

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Aprianto ^{1*}, Zulkifli ², Edy Firza ³

^{1*,2,3} Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jln. Jl Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia.

Corresponding Email: apridmr3@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 12 April 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 15 Juli 2026; *Diterima* 10 Agustus 2026; *Diterbitkan* 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Aprianto, A., Zulkifli, Z., & Firza, E. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4108-4123. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.6921>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sumber pembiayaan utama yang digunakan dalam Belanja Modal berasal dari PAD dan transfer pemerintah pusat seperti DAK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama periode tahun 2022–2023. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Begitu pula dengan DAK, yang juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan, PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui PAD dan optimalisasi pemanfaatan DAK dapat memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Khusus (DAK); Belanja Modal.

Abstract

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD) and Special Allocation Funds (DAK) on Capital Expenditure in regencies and cities within South Sumatra Province. Capital Expenditure is a key indicator in measuring regional government performance in infrastructure development and public service delivery. The main sources of funding for Capital Expenditure come from PAD and central government transfers such as DAK. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the budget realization reports (APBD) of regencies/cities in South Sumatra for the period 2022–2023. The analysis method used is multiple linear regression to determine the extent to which PAD and DAK affect Capital Expenditure. The results show that partially, PAD has a significant positive effect on Capital Expenditure. Likewise, DAK also has a significant positive effect on Capital Expenditure. Simultaneously, PAD and DAK have a significant influence on Capital Expenditure in the regencies/cities of South Sumatra Province. These findings indicate that increasing regional fiscal capacity through PAD and optimizing the use of DAK can strengthen regional development financing.

Keyword: Regional Original Revenue (PAD); Special Allocation Funds (DAK); Capital Expenditure.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Dalam belanja modal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena belanja modal berkaitan langsung dengan pengadaan aset tetap seperti infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan sarana penunjang lainnya. Pembiayaan belanja modal daerah bersumber dari berbagai pos pendapatan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah karena berasal dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Sementara itu, DAK merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan tertentu di daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Namun, pada kenyataannya, kapasitas PAD di banyak daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, masih relatif rendah dan belum mampu sepenuhnya mendanai belanja modal yang dibutuhkan. Akibatnya, ketergantungan terhadap transfer pusat seperti DAK menjadi sangat tinggi. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana PAD dan DAK dapat memengaruhi besaran belanja modal daerah, dan apakah peningkatan PAD secara signifikan mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur, penting untuk memahami hubungan antara komponen pendapatan daerah dan pengeluaran modal. Melalui pemahaman tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi fiskal yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2020–2023. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Sularso dan Restianto (2010), Dalam pelaksanaannya, PAD seringkali belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal yang ideal, sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 206/PMK.07/2022, merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik, yang keduanya turut mendukung peningkatan belanja modal. Namun demikian, penggunaan DAK memiliki batasan dan peruntukan yang ketat, sehingga fleksibilitas pengelolaannya berbeda dengan PAD. Di Provinsi Sumatera Selatan, kondisi keuangan daerah menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota, baik dari sisi PAD maupun kemampuan belanja modalnya. Beberapa daerah memiliki PAD yang cukup tinggi namun belanja modalnya tidak maksimal, dan sebaliknya, terdapat daerah dengan PAD rendah tetapi bergantung besar pada DAK untuk membiayai pembangunan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara empiris berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Hal ini menjadi krusial mengingat:

- 1) Kementerian Dalam Negeri, melalui Permendagri No. 77 Tahun 2020, menekankan bahwa belanja modal harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik berbasis kinerja keuangan yang efektif.
- 2) Kementerian Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07/2022, mengatur bahwa DAK diberikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang merupakan prioritas nasional, yang artinya penggunaannya terbatas dan diarahkan untuk belanja modal strategis.
- 3) Pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, sebagaimana tercantum dalam berbagai kebijakan fiskal nasional dan laporan evaluasi kinerja keuangan daerah.

RESEARCH ARTICLE

Dengan demikian, analisis empiris terhadap pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja modal tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan dan pengambilan kebijakan fiskal di daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pihak principal, pemilik kepentingan atau pemberi mandat dan pihak agent pelaksana atau pengelola mandat, yang dalam konteks pemerintahan daerah merujuk pada masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Menjadi relevan dalam pengelolaan keuangan daerah karena menggarisbawahi potensi konflik kepentingan antara masyarakat sebagai pemilik dana publik dan pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran. Ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan moral hazard, di mana agen pemerintah daerah tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam pengalokasian anggaran seperti belanja modal. Dalam pengumpulan Pendapatan (PAD) dan pengelolaan Dana (DAK), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan transparan. Belanja modal yang tepat guna dan tepat sasaran mencerminkan kinerja agen yang baik dalam memenuhi harapan prinsipal. Sebaliknya, penggunaan dana yang tidak optimal menunjukkan adanya kegagalan agen dalam menjalankan fungsinya, yang dapat menyebabkan distrust publik dan rendahnya akuntabilitas. Belanja modal menjadi instrumen penting karena mencerminkan investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap yang mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa belanja modal merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh Sulistyowati dan Asmara (2018) yang menemukan bahwa pengalokasian belanja modal yang tepat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan produktivitas wilayah. Peningkatan PAD seharusnya menjadi indikator peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan karenanya diharapkan pemerintah daerah akan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap melalui belanja modal. Namun, dalam praktiknya, keputusan penggunaan PAD tidak selalu mencerminkan kepentingan masyarakat, karena adanya potensi moral hazard dan penggunaan dana untuk belanja yang tidak produktif.

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, termasuk pendapatan dan belanja. Menurut Hill (2004), desentralisasi fiskal di Indonesia membawa tantangan baru, terutama dalam hal ketimpangan kapasitas fiskal dan kelembagaan antar daerah. Oleh karena itu, sistem transfer fiskal dari pemerintah pusat menjadi penting sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan keadilan antar daerah. Dalam konteks ini, belanja modal menjadi instrumen penting bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap seperti gedung, jalan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang. Belanja modal sangat penting dalam mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat belanja modal sering dijadikan indikator seberapa serius pemerintah daerah dalam berinvestasi untuk masa depan. Menurut Bastian, (2017) Belanja modal mencakup seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan barang modal, yang akan menambah kekayaan daerah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo, (2023) PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan guna membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi daerah. Oleh karena itu, PAD diharapkan memiliki hubungan positif dengan belanja modal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah, yaitu pungutan wajib oleh daerah kepada individu atau badan yang bersifat memaksa.
- 2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, seperti dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 4) Lain-lain PAD yang Sah, seperti pendapatan bunga bank, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipakai, dan penerimaan lain yang tidak termasuk dalam komponen sebelumnya.

Tujuan utama dari PAD adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
- 2) Mendorong kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.
- 3) Mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Bastian, (2017) DAK adalah alokasi dana dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai pengeluaran tertentu di daerah, terutama untuk sektor-sektor yang dianggap prioritas dan memerlukan perhatian khusus sesuai kebijakan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, sesuai dengan fungsi desentralisasi.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Jurnal	Variabel	Hasil
1	Ika Setia Ningsi, 2023	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal: Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Sumatera Selatan	1. (PAD) Pendapatan Asli Derah (X1) 2. (DAU) Dana Alokasi Umum (X2) 3. tingkat kekayaan daerahsea simultan (X3) 4. Belanja Modal (Y)	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. 3. tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2	Taufik Hidayt, 2024	Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan	1 (DAU) Dana Alokasi umum (X1) 2 (PAD) Pendapatan Asli Derah (X2)	1 DAU dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

RESEARCH ARTICLE

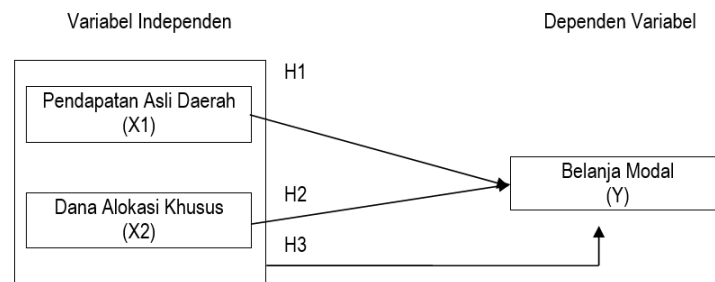
		kinerja keuangan terhadap belanja modal jawa barat	3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (X3) 4 Belanja Modal (Y)	2 PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3	Yulia Citra, 2024	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum terhadap belanja modal daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating	1 (PAD) Pendapatan Asli Daerah (X1) 2 (DAK) Dana Alokasi Khusus (X2) 3 Belanja Modal (Y)	1 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Moda 2 Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4	Paulus Peka Hayon, 2024	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Berimbang Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Papua	1 (PAD) Pendapatan Asli Daerah (X1) 2 (DAU) Dana Alokasi Umum 3 Belanja	1 Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 2 Hasil pengolahan data variabel Dana Berimbangan untuk alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal
5	Seprita Siska Manurung, 2025	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota provinsi sumatera selatan periode 2017-2021	1 (PAD) Pendapatan Asli Daerah (X1) 2 (DAU) Dana Alokasi Umum(X2) 3 Belanja Modal (Y)	1 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal 2 Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu (PAD) dan (DAK) sebagai variabel independen, serta Belanja

RESEARCH ARTICLE

Modal sebagai variabel dependen. Dalam desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Salah satu indikator kemandirian tersebut adalah besarnya PAD yang dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan, termasuk belanja modal. Di sisi lain, DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Sebagian besar alokasi DAK ditujukan untuk proyek- proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur, sehingga penggunaannya berkaitan erat dengan peningkatan belanja modal. Dengan demikian kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran tersebut menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis serta menyusun model analisis regresi untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif. Menurut Sugiyono, (2021) Pendekatan ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (PAD dan DAK) terhadap variabel dependen belanja modal. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data panel time series dan cross section, sehingga analisis dilakukan menggunakan model regresi data panel. Menurut Sugiyono (2021), data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu variabel pada periode tertentu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan antara data time series (tahun 2022–2023) dan cross section (17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini juga bersifat eksplanatif, karena bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendalam dan sistematis mengenai fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana PAD dan DAK memengaruhi kebijakan belanja modal di tingkat daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

3.1 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah "Wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya" Sugiyono, (2021) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2023 yang dapat di lihat pada tabel 2. Populasi Penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. Populasi Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir

RESEARCH ARTICLE

3	Kabupaten Muara Enim
4	Kabupaten Lahat
5	Kabupaten Musi Rawas
6	Kabupaten Musi Banyuasin
7	Kabupaten Banyuasin
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10	Kabupaten Ogan Ilir
11	Kabupaten Empat Lawang
12	Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir
13	Kabupaten Musi Rawas Utara
14	Kota Palembang
15	Kota Prabumulih
16	Kota Pagar Alam
17	Kota Lubuk Linggau

Populasi ini dipilih karena seluruh kabupaten/kota tersebut memiliki laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara periodik, yang meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Data yang dikaji dalam penelitian ini meliputi periode tahun 2022 hingga 2023, sehingga secara total terdapat 34 unit observasi (17 daerah × 2 tahun).

2) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk dianalisis. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposivesampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah 34 data (17 daerah × 2 tahun). Rincian sampel penelitian ditampilkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki situs resmi (website) yang dapat diakses dan dalam kondisi aktif	17
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	17
Jumlah tahun penelitian	2
Jumlah observasi (12 kabupaten/kota × 2 tahun)	34

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka keuangan yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber yang telah tersedia sebelumnya. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Data Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh kabupaten/kota.
- 3) Data Belanja Modal yang direalisasikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

RESEARCH ARTICLE

Data tersebut dikumpulkan untuk periode tahun 2022 hingga 2023, mencakup seluruh 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga jumlah total observasi sebanyak 34 (17 daerah × 2 tahun).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan sumber-sumber yang relevan.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dalam penelitian ini, meliputi variabel (Y), (PAD), (DAK) fisik dan (DAK) Non fisik pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2022–2023. Statistik deskriptif mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (Tahun 2022–2023)

	Y	X1	X2
Mean	26.87220	25.74833	26.26909
Median	26.82247	25.58775	26.15954
Maximum	27.73683	27.99748	28.60492
Minimum	25.84862	24.52582	23.42213
Std. Dev.	0.486425	0.886995	0.982613
Skewness	0.161127	1.004842	0.038814
Kurtosis	2.443186	3.616231	4.515813
Jarque-Bera	0.586343	6.259640	3.263598
Probability	0.745894	0.043726	0.195577
Sum	913.6547	875.4431	893.1491
Sum Sq. Dev.	7.808099	25.96309	31.86243
Observations	34	34	34

Berdasarkan Tabel 4 hasil statistik deskriptif dari variabel (PAD), (DAK), dan Belanja Modal menunjukkan nilai-nilai statistik sebagai berikut:

- 1) Variabel Belanja Modal (Y) Memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 26.87, yang menunjukkan rata-rata belanja modal di kabupaten/kota selama tahun 2022–2023. Nilai minimum sebesar 25.85 dan maksimum sebesar 27.73, menunjukkan adanya variasi belanja modal antar daerah. Standar deviasi sebesar 0.468 menunjukkan bahwa penyebaran data Belanja Modal tergolong rendah.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) Nilai mean sebesar 25.75, dengan minimum 24.52 dan maksimum 27.99. Standar deviasi sebesar 0.886, mengindikasikan bahwa penyebaran PAD antar kabupaten/kota cukup bervariasi. Nilai skewness sebesar 1.08 menunjukkan bahwa distribusi PAD condong ke kanan (positif), artinya sebagian besar daerah memiliki PAD di bawah rata-rata.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X2) Rata-rata (mean) sebesar 26.27, dengan sebaran nilai dari 23.42 hingga 28.60. Standar deviasi terbesar yaitu 0.983, menunjukkan bahwa distribusi DAK lebih

RESEARCH ARTICLE

menyebar dibandingkan variabel lain. Nilai kurtosis sebesar 4.52 menunjukkan bahwa distribusi data DAK bersifat leptokurtik, atau memiliki puncak distribusi yang lebih tinggi dari distribusi normal.

4.1.1 Hasil Uji Regresi Logistik

Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel dependen, yaitu belanja modal, dikategorikan secara biner misalnya: tinggi = 1, rendah = 0). Model ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap peluang suatu daerah memiliki tingkat belanja modal yang tinggi.

4.1.2 Uji Chow (Chow Test)

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* dalam analisis regresi data panel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara intersep masing-masing unit cross-section (dalam hal ini kabupaten/kota) yang diamati dalam model.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.663868	(16,15)	0.0324
Cross-section Chi-square	45.758980	16	0.0001

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/01/25 Time: 22:14
Sample: 2022 2023
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.01030	2.790206	7.530017	0.0000
X1	0.252763	0.089939	2.810372	0.0085
X2	-0.024604	0.081187	-0.303056	0.7639

R-squared	0.205023	Mean dependent var	26.87220
Adjusted R-squared	0.153734	S.D. dependent var	0.486425
S.E. of regression	0.447475	Akaike info criterion	1.313707
Sum squared resid	6.207262	Schwarz criterion	1.448386
Log likelihood	-19.33302	Hannan-Quinn criter.	1.359636
F-statistic	3.997412	Durbin-Watson stat	1.161505
Prob(F-statistic)	0.028543		

Berdasarkan Tabel 5, hasil Uji Chow di atas, nilai $p\text{-value } F (0.0324) < 0.05$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kabupaten/kota yang diamati selama periode penelitian, sehingga model dengan efek tetap lebih sesuai digunakan. Interpretasi Hasil Koefisien:

- 1) Konstanta (C) = 21.0103. Artinya, jika nilai PAD (X1) dan DAK (X2) adalah nol, maka Belanja Modal (Y) diperkirakan sebesar 21.0103. Meskipun kondisi ini tidak realistis secara empiris, nilai ini berguna dalam membentuk garis regresi sebagai titik awal prediksi.
- 2) Koefisien PAD (X1) = 0.252763. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan PAD akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.252763, dengan asumsi DAK tetap. Karena nilai $p\text{-value} = 0.0085 < 0.05$, maka pengaruh PAD terhadap Belanja Modal adalah signifikan secara statistik.
- 3) Koefisien DAK (X2) = -0.024604. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan DAK justru menyebabkan penurunan Belanja Modal sebesar 0.024604, dengan asumsi PAD tetap. Namun, nilai $p\text{-value} = 0.7639 > 0.05$, sehingga pengaruh DAK terhadap Belanja Modal tidak signifikan secara statistik.

4.1.3 Uji Hausman (Hausman Test)

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model *Random Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih tepat digunakan dalam regresi data panel, dengan melihat ada tidaknya korelasi antara efek individual dengan variabel independen. Berikut ini tabel 6 yang menunjukkan hasil Uji Hausman.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Uji	Nilai
Chi-Square Statistic	2.538385
Derajat Kebebasan (df)	2
p-value (Prob.)	0.2811

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji *Hausman* diperoleh nilai *p-value* sebesar 0.2811, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Oleh karena itu, H_0 diterima, yang berarti model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Dengan demikian, model *Random Effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini dibandingkan model *Fixed Effect*. Pemilihan model ini memungkinkan untuk menangkap variasi antar kabupaten/kota secara acak, tanpa mengasumsikan bahwa perbedaan tersebut berkorelasi dengan variabel-variabel independen seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4.1.4 Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji Lagrange Multiplier (LM Test) digunakan untuk menentukan apakah model *Random Effect (REM)* lebih sesuai dibandingkan model *Common Effect (CEM)*. Dalam penelitian ini, LM Test dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya *Breusch-Pagan*, *Honda*, *King-Wu*, dan *Gourieroux, et al.*

Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat efek individual (*Common Effect* tepat digunakan).

H_1 : Terdapat efek individual (*Random Effect* lebih tepat).

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Metode Uji	Nilai Statistik	p-value	Keputusan
Breusch-Pagan (Cross)	6.647028	p-value	H_0 ditolak $\rightarrow$ REM lebih tepat
Honda (Cross)	2.578183	0.0050	H_0 ditolak $\rightarrow$ REM lebih tepat
King-Wu (Cross)	2.578183	0.0050	H_0 ditolak $\rightarrow$ REM lebih tepat
Gourieroux, et al.	6.647028	0.0140	H_0 ditolak $\rightarrow$ REM lebih tepat

Berdasarkan Tabel diatas hasil uji LM *Breusch-Pagan* menunjukkan nilai statistik sebesar 6.647028 dengan probabilitas sebesar 0.0099 untuk *cross-section*. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga model regresi panel yang tepat adalah *Random Effect*.

4.1.5 Hasil Estimasi Model Common Effect (CEM)

Model *Common Effect (CEM)* merupakan model regresi data panel yang mengasumsikan bahwa semua individu atau entitas, (dalam hal ini kabupaten/kota) memiliki *intercept* yang sama. Model ini tidak memperhitungkan perbedaan karakteristik antar individu. Berikut ini tabel 9. yang menunjukkan hasil Estimasi Model *Common Effect (CEM)*

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Common Effect Model (CEM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
PAD (X1)	0.703127	0.111202	6.322989	0.0000
DAK (X2)	0.333166	0.108986	3.056960	0.0045

Berdasarkan tabel 8, PAD (X1) memiliki koefisien sebesar 0.703127 dan signifikan secara statistik (*p-value* = 0.0000 < 0.05). Artinya, setiap kenaikan 1 satuan PAD akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.703127 satuan. DAK (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan

RESEARCH ARTICLE

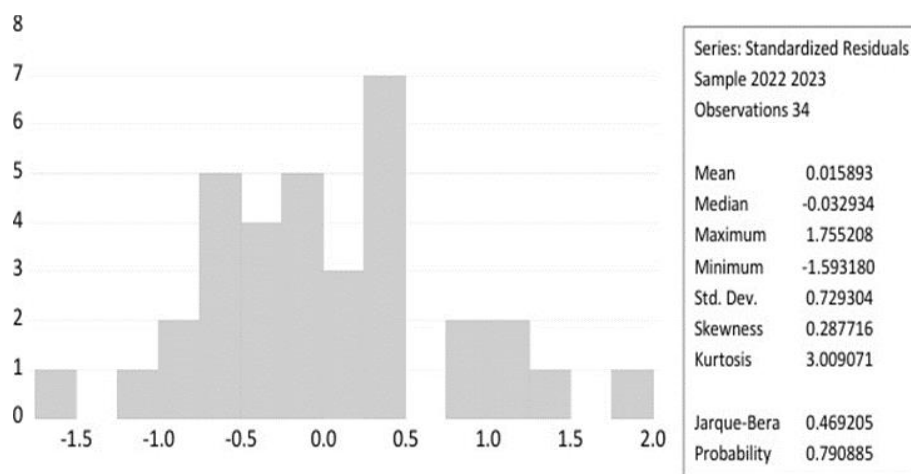
koefisien 0.333166 dan $p\text{-value} = 0.0045 < 0.05$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan DAK berkontribusi terhadap peningkatan Belanja Modal.

4.1.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan karena penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dalam bentuk data panel. Dalam aplikasi *EViews*, pengujian asumsi klasik seperti *normalitas*, *multikolinearitas*, *heteroskedastisitas*, dan *autokorelasi* dapat dilakukan apabila model *regresi* dibangun dengan prosedur *regresi linier*.

4.1.7 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model *regresi* terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan Uji *Jarque-Bera* yang ditampilkan melalui histogram residual pada *output EViews*.



Gambar 3. Uji Normalitas

Nilai nilai probabilitas sebesar $0.790885 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model *regresi* berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi, dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.1.8 Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model *regresi*. Apabila terjadi *multikolinearitas*, maka estimasi *parameter regresi* menjadi tidak efisien dan sulit untuk menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

- 1) Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai VIF ≥ 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini:

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF	Keterangan
X1 (PAD)	1.000218	Tidak terjadi multikolinearitas
X2 (DAK)	1.000218	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji *multikolinearitas*, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF jauh di bawah 10. Dengan demikian, tidak terdapat *multikolinearitas* dalam model *regresi* ini.

RESEARCH ARTICLE

4.1.9 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual di dalam model regresi panel. Jika varians dari residual tidak konstan *heteroskedastisitas*, maka model dianggap tidak memenuhi asumsi klasik dan dapat menyebabkan estimasi yang tidak efisien. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode *Glejser Test*.

- 1) Jika nilai probabilitas (Prob.) > 0,05, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.
- 2) Jika nilai probabilitas (Prob.) ≤ 0,05, maka terjadi *heteroskedastisitas*.

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser Test)

Variabel	Probabilitas	Keterangan
X1 (PAD)	0.5185	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2 (DAK)	0.7520	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji *Glejser*, masing-masing variabel independen yaitu PAD (X1) dan DAK (X2) memiliki nilai *probabilitas* lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengandung gejala *heteroskedastisitas*, sehingga model *regresi* dapat dikatakan telah memenuhi asumsi klasik *heteroskedastisitas* dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4.1.10 Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara nilai residual dari satu periode dengan periode lainnya. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu uji *Durbin-Watson (DW) Test*. Adapun kriteria penilaiannya adalah:

- 1) Nilai DW mendekati 2: tidak terjadi autokorelasi.
- 2) Nilai DW < 1,5: terjadi autokorelasi positif.
- 3) Nilai DW > 2,5: terjadi autokorelasi negatif.

4.1.11 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022–2023.

Tabel 11. Hasil Regresi Linear Berganda dengan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.49352	8.258323	3.087009	0.0075
X1	-0.059366	0.199381	-0.297751	0.7700
X2	0.110672	0.249605	0.443388	0.6638
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.793053	Mean dependent var	26.87220	
Adjusted R-squared	0.544717	S.D. dependent var	0.486425	
S.E. of regression	0.328213	Akaike info criterion	0.909031	
Sum squared resid	1.615860	Schwarz criterion	1.761997	
Log likelihood	3.546471	Hannan-Quinn criter.	1.199917	
F-statistic	3.193469	Durbin-Watson stat	3.777778	
Prob(F-statistic)	0.013804			

- 1) Konstanta (C) sebesar 25.49352 menyatakan bahwa jika PAD dan DAK bernilai nol, maka belanja modal daerah adalah sebesar 25.49352 satuan (dalam skala tertentu).

RESEARCH ARTICLE

- 2) Koefisien PAD (X1) bernilai negatif sebesar -0.059366, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1 satuan, maka belanja modal akan menurun sebesar 0.059366, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun, nilai probabilitasnya $0.7700 > 0.05$, yang berarti tidak signifikan secara statistik.
- 3) Koefisien DAK (X2) bernilai positif sebesar 0.110672, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar 1 satuan akan meningkatkan belanja modal sebesar 0.110672, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun, nilai probabilitasnya $0.6638 > 0.05$, sehingga juga tidak signifikan secara statistik.

4.1.12 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (belanja modal) oleh variabel independen (PAD dan DAK). Berdasarkan hasil *estimasi regresi* dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*, diperoleh nilai:

- a) R-squared (R^2) sebesar 0.793053
- b) Adjusted R-squared sebesar 0.544171

Nilai R-squared sebesar 0.793053 atau 79,31% menunjukkan bahwa variabel independen PAD dan DAK, serta efek tetap dari masing-masing daerah, secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dalam belanja modal sebesar 79,31%. Dengan kata lain, model memiliki kemampuan penjabar yang tinggi. Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0.544171 atau 54,42% mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan unit analisis, variabel independen masih mampu menjelaskan variasi belanja modal dengan cukup baik.

4.1.13 Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen Belanja Modal. Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Variabel PAD (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal karena nilai probabilitasnya $0.0000 < 0.05$.
- b) Variabel DAK (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal karena nilai probabilitasnya $0.0045 < 0.05$.

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
X1 (PAD)	0.703127	6.322989	0.0000 (***)
X2 (DAK)	0.333166	3.056690	0.0045 (**)

Berdasarkan hasil tabel diatas secara parsial, PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan pada tahun 2022–2023.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji *signifikansi simultan* atau uji *F* digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama *simultan* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan *output model Fixed Effect (FEM)* diperoleh nilai:

- a) F-statistic = 3.194369
- b) Prob(F-statistic) = 0.013804

Nilai Prob(F-statistic) sebesar $0.0138 < 0.05$ menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, variabel independen PAD (X1) dan DAK (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022–2023 menggunakan pendekatan model data panel. Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), diketahui bahwa nilai *koefisien determinasi* (*R-squared*) sebesar 0,793053, yang berarti bahwa sekitar 79,31% variasi dalam Belanja Modal dapat dijelaskan oleh PAD dan DAK, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil uji *signifikansi simultan* (*Uji F*) menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 3.194369 dengan *Prob* (*F-statistic*) sebesar $0.013804 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara *simultan*, PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, berdasarkan uji *signifikansi parsial* (*Uji t*), hanya variabel C (konstanta) yang signifikan dengan nilai *Prob* sebesar 0.0075, sedangkan variabel PAD (X1) dan DAK (X2) masing-masing memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7700 dan 0.6638, yang berarti tidak signifikan secara individual terhadap Belanja Modal pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, meskipun secara bersama-sama (*simultan*) PAD dan DAK memengaruhi belanja modal, tetapi secara parsial keduanya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Model terbaik berdasarkan hasil uji *Chow* dan uji *Hausman* adalah *Fixed Effect Model*, yang berarti bahwa perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota (*cross-section*) berpengaruh terhadap hubungan antara PAD, DAK, dan Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya PAD dan DAK, tetapi kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti efisiensi anggaran, prioritas pembangunan daerah, intervensi pusat, serta kapasitas fiskal dan kelembagaan masing-masing daerah. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi prioritas dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan merealisasikan belanja modal. Oleh karena itu, meskipun PAD dan DAK memiliki pengaruh yang signifikan, tidak menutup kemungkinan bahwa variasi belanja modal antar daerah juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal, meskipun signifikansi pengaruhnya bervariasi tergantung pada model estimasi yang digunakan. Dalam model Common Effect, PAD signifikan memengaruhi belanja modal, sedangkan dalam model Fixed Effect, pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja modal tidak seragam di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, menjadi salah satu sumber pendanaan utama dalam pembangunan infrastruktur daerah; semakin besar DAK Fisik yang diterima, semakin besar pula belanja modal yang dapat direalisasikan. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena lebih diarahkan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti honorarium tenaga pendidik, pelatihan, dan pelayanan publik non-infrastruktur, sehingga tidak berdampak langsung terhadap peningkatan belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan mengembangkan sumber-sumber PAD yang potensial secara berkelanjutan, seperti sektor pariwisata, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan optimalisasi aset daerah. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pajak dan retribusi daerah juga perlu ditingkatkan guna menunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD. Kedua, agar penggunaan DAK benar-benar efektif, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan belanja modal yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program yang dibiayai DAK untuk memastikan dampak nyata terhadap peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Ketiga, diperlukan perencanaan jangka menengah dan panjang yang fokus pada pembangunan sarana dan prasarana strategis yang mendukung pertumbuhan

RESEARCH ARTICLE

ekonomi daerah, seperti jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta (public-private partnership) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

6. Referensi

- Adi, I. W. (2020). *Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Z. (2020). *Teori dan Konsep Keuangan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022–2023*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, W. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Indonesia. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(2), 85–97.
- Hill, H. (2004). *Otonomi Daerah Perkembangan dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismail, M. (2022). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Laksana.
- Kuncoro, M. (2020). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawardani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(01), 1–9.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, A. (2019). Evaluasi Dana Alokasi Khusus dalam Meningkatkan Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 14(3), 123–135.
- Permendagri No. 77 Tahun (2020). tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahmawati, Y. (2023). Efektivitas Pemanfaatan DAK dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 34–46.
- Republik Indonesia. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

RESEARCH ARTICLE

- Saputra, D. (2020). Analisis Belanja Modal dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 22–30.
- Siregar, E., & Muda, I. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 45–56.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, & Restianto, F. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sulistiyowati, M. S., & Asmara, H. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(5), 1–16.